

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebocoran data pribadi pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu. Mayoritas responden mengakui bahwa kebocoran data, termasuk pencatutan KTP secara ilegal, merupakan isu serius yang mengikis kepercayaan terhadap integritas, transparansi, dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Berdasarkan teori Vavilis et al. (2014), kebocoran data yang terjadi dapat dikategorikan dalam tingkat keparahan tinggi karena memenuhi tiga indikator utama: jumlah data yang signifikan, data yang bersifat sensitif, serta adanya potensi keteridentifikasi individu, yang mana hal tersebut menimbulkan kekhawatiran publik terhadap penyalahgunaan informasi pribadi mereka.

Lebih lanjut, hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa KPU gagal memenuhi ekspektasi publik dalam perlindungan data pribadi. KPU dinilai tidak memiliki komitmen yang jelas, kurang transparan, dan tidak cukup kompeten dalam menjamin keamanan data pemilih. Berdasarkan teori kepercayaan publik oleh Van de Walle & Bouckaert (2003) serta indikator Kim (2010), kepercayaan publik mencakup persepsi atas komitmen, kejujuran, ketulusan, kompetensi, dan keadilan.

Temuan ini diperkuat oleh uji korelasi yang menunjukkan hubungan negatif dan signifikan antara kebocoran data dan kepercayaan publik, artinya semakin besar kebocoran data, maka semakin rendah tingkat kepercayaan masyarakat. Hasil uji regresi linear sederhana juga menunjukkan bahwa kebocoran data memberikan dampak nyata terhadap kepercayaan publik, meskipun terdapat variabel lain yang turut memengaruhi.

Kondisi ini berdampak langsung pada partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan data KPU Jakarta, angka golput dalam Pilkada

DKI Jakarta 2024 mencapai 42,48% dari total 8,21 juta DPT, menjadikannya tingkat golput tertinggi sepanjang sejarah Pilkada DKI. Artinya, lebih dari 3,4 juta pemilih tidak menggunakan hak suaranya. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa penurunan kepercayaan terhadap KPU, yang sebagian besar dipicu oleh isu kebocoran data, menjadi salah satu faktor penting yang mendorong meningkatnya angka golput. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi bukan hanya isu teknis, melainkan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik dan partisipasi dalam proses demokrasi.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu terutama dalam kasus kebocoran data, memperkuat perlindungan data pribadi pemilih sangatlah diperlukan. KPU harus melakukan verifikasi secara rinci dan menyeluruh terhadap data yang diajukan oleh pasangan calon guna memastikan keabsahan informasi yang digunakan dalam proses pemilu dan mencegah terjadinya pencatutan data warga secara ilegal. KPU juga harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan informasi pemilih, termasuk memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat mengenai bagaimana data mereka disimpan dan digunakan. Selain itu, diperlukan pengawasan dan audit independen secara berkala untuk mengidentifikasi serta mencegah potensi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi pemilih. Diperlukan pula adanya regulasi yang lebih ketat serta pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah kebocoran data, seperti dengan mengadopsi teknologi keamanan *cyber* yang lebih tinggi untuk mengurangi risiko kebocoran informasi sensitif